



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2018 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2023 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan APBD Tahun 2023 adalah:

- a) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 25 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
- j) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor .. Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- k) Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- l) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor .. Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- m) Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor .. Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- q) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- r) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;

- s) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- t) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- u) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- v) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- w) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- x) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 3.1. Pos - Pos Laporan Realisasi Keuangan (LRA)
- 3.2. Pos - Pos Neraca
- 3.3. Pos - Pos Laporan Operasional (LO)
- 3.4. Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab IV Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab V Penutup



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis mengacu kepada realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 96,08 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 17.131.922.642,- terealisasi sebesar Rp 16.460.261.790,-.

Adapun uraian realisasi kinerja program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan sampai 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut :

Program dan Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi per 31 Desember 2023	Persentase (%)
ANGGARAN		13.801.442.760	13.465.774.221	97,57
Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.770.000	3.770.000	100
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.265.000	3.265.000	100
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.025.000	2.025.000	100
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.065.000	2.065.000	100
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.425.000	2.425.000	100
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.550.000	3.550.000	100
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.420.000	3.420.000	100
8)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.321.000	4.321.000	100
9)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan	13.500.000	13.500.000	100
10)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.350.000	3.350.000	100

Catatan Atas Laporan Keuangan 2023

11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.037.400	10.037.400	100
12)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.288.000	16.288.000	100
13)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.205.880	53.183.280	99,9
14)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.113.100	3.113.100	100
15)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.490.000	52.488.267	99,9
16)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.985.920	99,9
17)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.500.000	100
18)	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	95.620.000	95.620.000	100
19)	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	83.000.000	81.695.666	98,96
20)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	9.299.000	9.299.000	100
21)	Pennyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.200.000	59.405.292	98,55
22)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.500.000	292.000.000	100
23)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	16.200.000	16.200.000	100
24)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	3.660.000	3.660.000	100
Program Penataan Desa		73.555.000	73.555.000	100
1)	Fasilitasi Sarana dan Prasaran Desa	73.555.000	73.555.000	100
Program Peningkatan Kerjasama Desa		4.650.000	4.650.000	100
1)	Fasilitasi Kerjasam Antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4.650.000	4.650.000	100
2)	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			

Program Administrasi Pemerintahan Desa		9.066.663.380	8.957.980.592	98,80
1)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	99.539.000	99.539.000	100
2)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	255.710.000	217.605.000	85,10
3)	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	8.569.204.380	8.498.876.592	99,18
4)	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar desa	68.310.000	68.310.000	100
5)	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30.160.000	30.160.000	100
6)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	43.740.000	43.490.000	99,43
Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		4.092.850.000	3.818.453.300	99,87
1)	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	218.505.000	218.255.000	99,89
2)	Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.080.527.500	2.028.617.500	99,87
3)	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelambagaan Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	600.000.000	552.981.000	92,16
4)	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30.160.000	30.160.000	100
5)	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	500.000.000	324.910.000	64,98
6)	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	400.000.000	399.872.300	99,97
7)	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	263.657.500	263.657.500	100

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Selama Tahun Anggaran 2023 program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak mengalami hambatan, akan tetapi terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yaitu tidak adanya gudang untuk penyimpanan alat-alat dan barang bantuan dan arsip, sehingga adanya keterbatasan dalam penyimpanannya, diharapkan agar adanya bantuan untuk membuat gudang tempat penyimpanan barang dan arsip.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Neraca Semesteran SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023. Neraca SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2022 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp 867.103.904,51 atau turun dibandingkan dengan posisi Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp 982.682.757,51. Nilai Aset sebesar Rp 867.103.904,51 tersebut, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 0, Aset Tetap sebesar Rp 867.103.904,51. Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 197.909.243, dan Ekuitas sebesar Rp 669.194.661,51 sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 867.103.904,51 dari jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 867.103.904,51.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan 31 Desember 2023, dikarenakan DPMD bukan merupakan SPKPD penghasil tetapi merupakan SKPD yang melayani pemerintahan desa. Sedangkan realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 16.460.261.790,- atau mencapai 96,08 % dari target anggaran sebesar Rp 17.131.922.642,- atau turun bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp 17.141.575.438.

Berdasarkan Laporan Operasional SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/defisit dari Operasi, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/defisit-LO yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Surplus/(defisit) LO SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2023 ditutup dengan nilai sebesar Rp (16.655.991.205) terdiri dari Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,- sedangkan jumlah Beban-LO adalah sebesar Rp 16.655.991.205, sehingga Surplus/(defisit) -LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp (16.655.991.205).

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2023 terdiri dari Nilai Ekuitas Awal sebesar Rp 864.924.076,51,- ditambah surplus/defisit-LO sebesar (Rp16.463.554.505), ditambah Dampak kumulatif senilai Rp 0,00 dan ditambah RK PPKD sebesar Rp16.460.261.790,- sehingga jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 669.194.661,51.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

3.1. POS-POS BELANJA- LRA

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada

Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.1.1 Belanja Operasi - LRA

Realisasi Belanja Operasi – LRA periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 16.450.275.870 atau mencapai 96,08% dari anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 17.131.922.462.- atau mengalami penurunan sebesar (3.57)% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp 17.059.879.772. Hal tersebut disebabkan terjadinya penurunan Belanja Belanja Pegawai sebesar (5.05)%, pada Belanja Barang dan Jasa sebesar (1.85)%, dan Belanja Bantuan Hibah (80)% dengan rincian sebagai berikut :

	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	3,220,479,882	2,934,501,649	91.12	3,090,679,276	(5.05)
2	Belanja Barang dan Jasa	13,801,442,760	13,465,774,221	97.57	13,719,200,496	(1.85)
3	Belanja Hibah	100,000,000	50,000,000	50.00	250,000,000	(80)
	Jumlah	17,121,922,642	16,450,275,870	96.08	17,059,879,772	(3.57)

3.1.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 2.934.501.649 atau mencapai 91,12% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.220.479.882 atau turun sebesar (5,05)% dari realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp 3.090.679.276. Terjadinya penurunan belanja pegawai disebabkan karena adanya karyawan yang pensiun, dengan rincian sebagai berikut :

(tabel di bawah ini uraian dan nilai diisi dengan rincian rekening liat di sipkd cetak lra rincian)

	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA PEGAWAI					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,756,824,329	1,691,168,386	96.26	1,802,365,056	(6.17)
2	Tambahan Penghasilan ASN	1,450,575,553	1,238,973,263	85.41	1,288,314,220	(3.83)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	13,080,000	4,360,000	33.33	-	100
	Jumlah	3,220,479,882	2,934,501,649	91.12	3,090,679,276	(5.05)

3.1.1.1.2. Belanja Barang Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 13.465.774.221 atau mencapai 97,57% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 13.801.442.760 atau turun sebesar (1,85)% dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp 13.719.200.496 Terjadinya penurunan pada belanja barang dan jasa disebabkan karena adanya pengurangan belanja hibah dan belanja modal peralatan dan mesin bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5	6	6
	BELANJA BARANG DAN JASA					
1	Belanja Pakai Habis	3.271.981.080	3.204.470.780	97,94	2.585.374.300	23,95
2	Belanja Bahan Material	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
3	Belanja Jasa Kantor	1.237.270.000	1.165.878.292	94,23	1.231.068.629	(5,30)
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.171.156.054	8.110.762.242	99,26	7.723.910.492	5,01
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	121.836.500	121.703.500	99,89	37.932.000	220,85
8	Bel. Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000	3.266.150	65,32	19.633.075	(83,36)
11	Belanja Perjalanan Dinas	795.989.126	726.983.257	91,33	975.807.000	(25,50)
14	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	-	-	#DIV/0!	40.000.000	(100,00)
16	Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	137.850.000	72.350.000	52,48	904.975.000	(92,01)
17	Belanja Pemeliharaan peralatan mesin dan Mesin	44.160.000	44.160.000	100,00	168.260.000	(73,75)
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Kantor	16.200.000	16.200.000	100,00	32.240.000	(49,75)
	Jumlah	13.801.442.760	13.465.774.221	97,57	13.719.200.496	(1,85)

3.1.2. Belanja Modal - LRA

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 9.985.920 atau mencapai 99,86% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp 10.000.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp 71.709.746 atau (87,78%) dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 81.695.666 yang disebabkan adanya penurunan modal Peralatan Mesin sebesar (87,78)% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA MODAL					
1.	Belanja Tanah	-	-		-	
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	10,000,000	9,985,920	99.86	81,695,666	(87.78)
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-		-	
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-		-	
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
	JUMLAH	10,000,000	9,985,920	99.86	81,695,666	(87.78)

Dari total realisasi belanja modal SKPD DPMD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 9.985.920.

3.1.2.1. Belanja Modal Tanah- LRA

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebesar Rp.0,00 (Nihil) atau tidak ada perubahan.

3.1.2.2. Belanja Modal Peralatan Mesin- LRA

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp. 9.985.920 atau sebesar 99,86 % dari target anggaran sebesar Rp. 10.000.000 atau turun sebesar 87,78% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 81.695.666.

No.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA MODAL					
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	#DIV/0!	12,978,125	(100.00)
	Belanja Modal Komputer	-	-	#DIV/0!	68,717,541	(100.00)
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10,000,000	9,985,920	99.86	-	#DIV/0!
	JUMLAH	10,000,000	9,985,920	99.86	81,695,666	(87.78)

3.1.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan- LRA

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nihil) atau tidak ada perubahan.

3.1.2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan- LRA

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp.0,00 (Nihil) atau tidak ada perubahan.

3.2. POS-POS NERACA

3.2.1. ASET	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1 ASET LANCAR	-	901.200

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0, sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 901.200 atau mengalami penurunan sebesar 100%. Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,- merupakan saldo akhir persediaan sebesar Rp 0 hasil Berita Acara Stock Opname per 31 Desember 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1.1. PERSEDIAAN	0	901.200

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 901.200 . Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0 merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Per 31 Desember 2023, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo per	Penambahan Jan-Des	Pengurangan Jan-Des	Saldo per
		31 Desember 2022			31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persediaan Habis Pakai	901,200	3,204,470,780	3,205,371,980	-
2.	Persediaan Tak Habis Pakai	-	-	-	-
3.	Persediaan Untuk Diserahkan/Dijual	-	-	-	-
	Jumlah Persediaan	901,200	3,204,470,780	3,205,371,980	-

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1.1.a.	Persediaan Habis Pakai	0	901.200

Saldo Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 901.200. Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin SKPD. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Pemegang Barang/Pengelola Barang pada DPMPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock opname yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan habis pakai terdiri dari alat tulis kantor dan sebagainya. Saldo Persediaan habis pakai yang berupa alat tulis kantor terdapat pada hampir seluruh SKPD.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1.1.b.	Persediaan untuk dijual/diserahkan	0	0

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan langsung pada masyarakat.

3.3.1.2. ASET TETAP		31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Aset Tetap sebelum Penyusutan	3.766.881.915,51	3.756.895.995,51
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.899.778.011,00)	(2.774.213.238,00)
	Aset Tetap setelah Penyusutan	867.103.904,51	982.682.757,51

KODREK	URAIAN	SALDO AWAL per 31 DESEMBER 2022	MUTASI		SALDO AKHIR per 31 DESEMBER 2023 (UN-AUDITED)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6
1.3.1.01.01	Tanah	277,200,000	-	-	277,200,000
1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	2,611,876,995.51	9,985,920.00	-	2,621,862,915.51
1.3.3.01.01	Gedung dan Bangunan	802,819,000	-	-	802,819,000
1.3.4.01.01	Jalan Irigasi dan Jaringan	65,000,000	-	-	65,000,000
1.3.5.01.01	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
1.3.6.01.01	Aset Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	3,756,895,995.51	9,985,920.00	-	3,766,881,915.51

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.766.881.915,51 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.756.895.995,51. Mutasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	U R A I A N	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
	Saldo awal Aset Tetap per 31 Desember 2022 (audited)		3,756,895,995.51
1).	Mutasi Penambahan :		
a.	Realisasi Belanja Modal	9,985,920	
b.	Hibah yang diterima	-	
c.	Koreksi Penambahan :		
	- Perolehan aset tetap dari non belanja modal	
	- Pencatatan aset lama yang belum tercatat (koreksi tambah)	-	
d.	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap	
e.	Mutasi Barang antar SKPD/Unit	-	
f.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	-	
			9,985,920
2).	Mutasi Pengurangan :		
a.	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
b.	Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	
c.	Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :		
	- Pengurangan Barang karena rusak berat dan lapuk	-	
	- Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/doble catat	
	- Reklas Menjadi Aset Tidak Berwujud	-	
	- Pengurangan barang krn barang jasa	-	
	- Pengurangan barang yang sudah dihapuskan	-	
	- Pengurangan Proses TGR	
d.	Mutasi Barang antar SKPD/Unit	-	
e.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	-	
			-
	Saldo Akhir Aset Tetap per 31 Desember 2023		3,766,881,915.51

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset tetap yang terjadi selama kurun waktu dari 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.1.1.2.a.	Tanah	277.200.000	277.200.000

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar 277.200.000 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 277.200.000, tidak mengalami perubahan karena tidak adanya realisasi atau mutasi masuk keluar antar SKPD.

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	277,200,000.00
2.	Mutasi Penambahan :	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Limpahan dari SKPD	-
	Reklas antar pos aset tetap	-
	Koreksi tambah hasil Inventarisasi	-
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	-
3.	Mutasi Pengurangan	-
	Limpahan ke SKPD	-
	Koreksi kurang karena double catat	-
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	277,200,000.00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.1.1.2.b.	Peralatan dan Mesin	2.621.862.915,51	2.611.876.995,51

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.621.862.915,51 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.611.876.995,51, mengalami penambahan sebesar Rp 9.985.920 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	2,611,876,995.51
2.	Mutasi Penambahan :	9,985,920
	Realisasi Belanja Modal	9,985,920
	Limpahan dari SKPD	-
	Reklas antar pos aset tetap	-
	Koreksi tambah hasil Inventarisasi	-
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	-
3.	Mutasi Pengurangan	-
	Limpahan ke SKPD	-
	Koreksi kurang karena double catat	-
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	2,621,862,915.51

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.1.1.2.c.	Gedung dan Bangunan	802.819.000	802.819.000

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 802.819.000. sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 802.819.000 mengalami penambahan sebesar Rp 0 dan pengurangan sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	802,819,000
2.	Mutasi Penambahan	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Reklasifikasi dari belanja barang jasa	-
	Limpahan dari SKPD	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Koreksi tambah hasil inventarisasi	-
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	-
3.	Mutasi Pengurangan	-
	Reklasifikasi ke ke aset lain-lain karena rusak berat	-
	Reklasifikasi ke Barang Jasa	-
	Dihapuskan sesuai SK PENGHAPUSAN	-
	Reklas antar pos aset tetap	-
	Dilimpahkan ke SKPD	-
	Dihibahkan ke masyarakat	-
	Tidak Masuk Kapitalisasi	-
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	802,819,000

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.1.1.2.d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.000.000	65.000.000

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 65.000.000. sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 65.000.000,- mengalami penambahan sebesar Rp 0, dan pengurangan sebesar Rp 0- dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	65,000,000
2.	Mutasi Penambahan	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Reklasifikasi ke Belanja barang jasa	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	-
3.	Mutasi Pengurangan	-
	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Dilimpahkan ke SKPD	-
	Dihibahkan ke masyarakat	-
4.	Saldo per 31 Desember 2023	65,000,000

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.1.1.2.e.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.899.778.011)	(2.774.213.238)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (2.899.778.011), sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp (2.774.213.238) mengalami penambahan sebesar Rp188.292.966,- dan pengurangan sebesar Rp 0,- Kebijakan akuntansi tentang aset tetap menetapkan bahwa penyusutan aset tetap dihitung per-bulan dan disajikan per-semesteran. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap juga mengatur tentang penggabungan atas segala bentuk pengadaan yang bersifat meningkatkan atau menambah aset tetap induk, termasuk juga penggabungan atas perhitungan penyusutan aset tetapnya. Hampir sebagian besar SKPD telah melaksanakan penggabungan atas seluruh pengadaan yang sifatnya rehabilitasi atau peningkatan dan meningkatkan masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut termasuk juga penggabungan penghitungan dan penyajian penyusutan aset tetapnya, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Saldo Awal Penyusutan	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	2,405,995,633	109,849,133	-	2,515,844,766
2	Gedung dan Bangunan	356,707,188	14,090,640	-	370,797,828
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	11,510,417	1,625,000	-	13,135,417
	Jumlah Penyusutan	2,774,213,238	125,564,773	-	2,899,778,011

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1. KEWAJIBAN	197.909.243	117.758.681

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 197.909.243 sedangkan saldo per per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 117.758.681. Kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 197.909.243 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,-

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1. Kewajiban Jangka Pendek	197.909.243	117.758.681

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 197.909.243, sedangkan saldo per per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 117.758.681. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp 197.909.243, merupakan bagian utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1.a.	Utang Belanja Pegawai	192.436.700	111.892.182
		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1.b.	Utang Belanja Barang dan Jasa	5.472.543	5.866.499

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 192.436.700 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 117.758.681 merupakan utang belanja yang bersifat untuk kegiatan operasional yaitu utang belanja pegawai sebesar Rp. 192.436.700 merupakan belanja pegawai TPP bulan Nopember dan Desember 2023 yang dibayar bulan Januari 2024 dan utang belanja jasa kantor untuk pembayaran telepon, air, listrik yang manfaat ekonomis penggunaan jasa kantor tersebut telah dinikmati pada bulan Desember 2023.

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	117,758,681	
	Pelunasan 2022	(117,758,681)	
2	Utang Belanja Pegawai 31 Desember 2023	192,436,700	
3	Utang Belanja Jasa Kantor 31 Desember 2023	5,472,543	
Saldo Akhir Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023		197,909,243.00	

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.3.1.	EKUITAS	669.194.661,51	864.924.076,51

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 669.194.661,51 sedangkan saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 864.924.076,51. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 669.194.661,51 merupakan hasil perhitungan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dari Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal per 31 Desember 2023 yang merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2022 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2022	864,924,076.51	Merupakan saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022
2.	RK PPKD	16,460,261,790.00	
3.	RK PPKD Barang	-	
4	Surplus/Defisit Operasional	(16,655,991,205.00)	
5	Dampak Kumulatif -Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	
6	Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023		669,194,661.51	

Sedangkan saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 669.194.661,51 merupakan hasil penjumlahan dari Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2023 dan Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2022 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam laporan keuangan tahun 2023 yang berbasis akrual penuh dikonversi atau digabung menjadi Saldo Ekuitas saja, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2022	864,924,076.51	Merupakan saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022
2.	RK PPKD	16,460,261,790.00	
3.	RK PPKD Barang	-	
4	Surplus/Defisit Operasional	(16,655,991,205.00)	
5	Dampak Kumulatif -Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	
6	Dampak Kumulatif -Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023	669,194,661.51	

3.3. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

3.3.1. Beban – LO

Realisasi Beban-LO sebesar Rp 16.655.991.205 terdiri dari realisasi Beban Operasional-LO sebesar Rp 16.655.991.205, Apabila dibandingkan antara realisasi Belanja Operasional-LRA sebesar Rp 16.450.275.870 dengan realisasi Belanja Operasional-LO sebesar Rp 16.450.275.870 terdapat selisih lebih besar belanja Operasional-LO sebesar Rp 197.909.243 disebabkan adanya penambahan beban utang belanja jasa kantor SKPD pada bulan Desember 2023 dan adanya beban persediaan SKPD yang digunakan dalam operasional pelaksanaan kegiatan SKPD dalam tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8)
9.	BEBAN -LO						
9.1.	BEBAN OPERASIONAL-LO	16,450,275,870	307,758,376	117,758,681	16,655,991,205	17,245,145,983	96.58
9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO	2,934,501,649	192,436,700	111,892,182	3,015,046,167	3,087,226,992	97.66
9.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO	3,204,470,780	-	-	3,204,470,780	2,585,374,300	123.95
9.1.3.	BEBAN JASA - LO	9,401,610,184	5,472,543	5,866,499	9,401,216,228	9,052,969,725	103.85
9.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO	60,360,000	-	-	60,360,000	200,500,000	30.10
9.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	726,983,257	-	-	726,983,257	975,807,000	74.50
	BEBAN UANG UNTUK DISERHAKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYR.-LO	72,350,000	-	-	72,350,000	904,975,000	7.99
	BEBAN HIBAH - LO	50,000,000			50,000,000	250,000,000	20.00
9.1.9.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - LO	-	109,849,133	-	109,849,133	172,577,326	63.65
9.1.10.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.11.	BEBAN LAIN-LAIN - LO	-	-	-	15,715,640	15,715,640	100.00
9.3.	DEFISIT NON OPERASIONAL - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.3.1.	DEFISIT PENGHENTIAN ASET - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	JUMLAH BEBAN - LO	16,450,275,870	307,758,376	117,758,681	16,655,991,205	17,245,145,983	96.58

3.3.1.1. Beban Operasional- LO

Beban Operasional – LO terdiri dari :

3.3.1.1.a Beban Pegawai – LO

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.015.046.1267, atau lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.934.501.649, terdapat selisih lebih sebesar Rp. 192.436.700, berasal dari Utang Belanja Gaji dan Tunjangan (TPP Bulan Nopember dan Desember 2023) dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN KARENA ADANYA PENGAKUAN UTANG	PENGURANGAN KARENA ADANYA PELUNASAN UTANG	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO	3,015,046,167	192,436,700	192,436,700	3,015,046,167	3,087,226,992	97.66
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1,693,634,754	-	-	1,693,634,754	1,802,365,056	93.97
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1,317,051,413	192,436,700	192,436,700	1,317,051,413	1,284,861,936	102.51
9.1.1.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	4,360,000	-	-	4,360,000	-	#DIV/0!
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO	3,015,046,167	192,436,700	192,436,700	3,015,046,167	3,087,226,992	97.66

3.3.1.1.b. Beban Persediaan – LO

Realisasi Beban Persediaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.204.470.780, atau sama besar Rp 3.204.470.780 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Persediaan-LRA per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN KARENA ADANYA SALDO AWAL	PENGURANGAN KARENA ADANYA SALDO AHIR BERDASARKAN STOCK OPNAME	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO						
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis - LO	3,204,470,780	-	-	3,204,470,780	2,585,374,300	123.95
9.1.2.02.	Beban Bahan/Material - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.2.03.	Beban Cetak dan Penggandaan - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.2.04.	Beban Makan dan Minuman - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.2.05.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.2.06.	Beban Pakaian Kerja - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.2.07.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.2.08.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.2.09.	Beban Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN - LO	3,204,470,580	-	-	3,204,470,780	2,585,374,300	123.95

3.3.1.1.c. Beban Jasa – LO

Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 9.401.216.228 atau lebih kecil jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Jasa-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp 9.401.610.184 yang disebabkan adanya penambahan karena adanya pelunasan utang jasa kantor tahun lalu dan adanya penambahan saldo utang jasa kantor tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN KARENA PENGAKUAN HUTANG BARU	PENGURANGAN KARENA ADANYA PELUNASAN HUTANG	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.3.	BEBAN JASA - LO						
9.1.3.01.	Beban Jasa Kantor - LO	1,165,878,292	5,472,543	5,866,499	1,165,484,336	1,231,434,158	94.64
9.1.3.04.	Beban iuran Jaminan Kesehatan	8,110,762,242	-	-	8,110,762,242	7,723,910,492	105.01
9.1.3.06.	Beban Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS - LO	-	-	-	-	4,000,000	-
9.1.3.09.	Beban Honorarium Non-PNS - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.3.13.	Beban Uang Saku/Transportasi Peserta - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.3.15.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LO	3,266,150	-	-	3,266,150	19,630,075	16.64
9.1.3.16.	Beban Sewa Sarana Mobilitas - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.3.17.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO	121,703,500	-	-	121,703,500	37,932,000	320.85
9.1.3.14.	BEBAN UANG UNTUK DISERHAKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYR.-LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	JUMLAH	9,401,610,184	5,472,543	5,866,499	9,401,216,228	9,016,906,725	104.26

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa terdapat pengurangan karena adanya pelunasan utang tahun lalu berupa pembayaran Utang Listrik, Telepon dan Internet Rp 5.472.543 dan adanya tambahan pengakuan saldo Utang Jasa Kantor tahun berjalan sebesar Rp 5.472.543 untuk membayar listrik, telepon, air, dan Pajak Penerangan Jalan yang manfaatnya telah dinikmati pada bulan Desember 2023 tetapi harus dibayar pada tahun 2024.

3.3.1.1.d. Beban Pemeliharaan – LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 60.360.000 atau sama dengan realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp 60.360.000 disebabkan tidak adanya transaksi pelunasan maupun penambahan utang belanja pemeliharaan selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN KARENA SALDO UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO						
9.1.4.01.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.4.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan mesin Kendaraan	44,160,000	-	-	44,160,000	168,260,000	26.25
9.1.4.03.	Beban Perawatan Peralatan/ Perlengkapan Kantor - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.4.04.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - LO	16,200,000	-	-	16,200,000	32,240,000	50.25
9.1.4.05.	Beban Perawatan Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.4.06.	Beban Perawatan Peralatan Laboratorium - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.4.07.	Beban Pemeliharaan Sarana Persampahan - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.4.08.	Beban Perlengkapan Komputer - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.4.09.	Beban Perlengkapan Gedung Kantor - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	JUMLAH	60,360,000	-	-	60,360,000	200,500,000	30.10

3.3.1.1.e. Beban Perjalanan Dinas – LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 726.983.257 atau sama dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp 726.983.257 disebabkan tidak adanya transaksi pelunasan maupun penambahan utang belanja perjalanan dinas selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN KARENA SALDO UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO						
9.1.5.01.	Beban Perjalanan Dinas - LO						
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	726.983.257	-	-	726.983.257	975.807.000	
9.1.5.01.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah - LO	463.783.500	-	-	463.783.500	657.710.000	70,51
9.1.5.01.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah - LO	263.199.757	-	-	263.199.757	318.097.000	82,74
	JUMLAH	726.983.257	-	-	726.983.257	975.807.000	74,50

3.3.1.1.i Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 125.564.773, sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi belanja karena beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi yang sistematis atas nilai satu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai akumulasi penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset yang tercatat dalam neraca dan diakui sebagai beban dalam tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.9.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI						
9.1.9.01.	BEBAN PENYUSUTAN	-	125,564,773	-	125,564,773	188,292,966	66.69
9.1.9.01.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	109,849,133	-	109,849,133	172,577,326	63.65
9.1.9.01.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	14,090,640	-	14,090,640	14,090,640	100.00
9.1.9.01.03.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	1,625,000	-	1,625,000	1,625,000	100.00
9.1.9.01.04.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	
9.1.9.01.05.	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.9.02.	BEBAN AMORTISASI	-	-	-	-	-	
9.1.9.02.01.	Beban Amortisasi	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	-	125,564,773	-	125,564,773	188,292,966	66.69

3.4. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2023 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp 669.194.661,51. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp 669.194.661,51 diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp 864.924.076,51 ditambah surplus-LO sebesar Rp (16.655.991.205) dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan senilai Rp 0, sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp 669.194.661,51. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

3.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 864.924.076,51, Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas Neraca per 31 Desember 2023 (*audited*) yang terdiri atas :

REK	URAIAN	2023	2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ekuitas Awal	864,924,076.51	971,999,022.51	
	RK PPKD	16,460,261,790.00	17,141,575,438.00	
	RK PPKD Barang	-	-	
	Surplus/ Defisit - LO	(16,655,991,205.00)	(17,248,650,384.00)	
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-	
	Koreksi Kesalahan - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	
	Koreksi Kesalahan - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	
	Koreksi Kesalahan - Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	
	Koreksi Kesalahan - Gedung dan Bangunan	-	-	
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	669,194,661.51	864,924,076.51	-

3.4.2 RK. PPKD

RK.PPKD Tahun 2023 sebesar Rp 16.460.261.790 diperoleh dari penerimaan dari Kas Daerah SP2D yang dibelanjakan selama periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023.

3.4.3 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (16.655.991.205) Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional dimana diperoleh dari pengurangan Pendapatan-LO sebesar Rp 0.0 dikurangi Beban-LO sebesar Rp 16.460.261.790, sehingga terdapat Defisit LO Sebesar Rp. (16.655.991.205).

3.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas misalnya dampak kumulatif perubahan kebijakan dengan diterapkannya penyusutan aset tetap tahun lalu dan penyisihan piutang tahun lalu, koreksi kesalahan mendasar seperti reklasifikasi aset tetap ke barang ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi, koreksi atas utang yang telah dilunasi pada tahun lalu, koreksi reklasifikasi pengakuan aset tetap menjadi barang jasa, dan sebagainya. Adapun rincian dampak kumulatif tersebut per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

REK	URAIAN	2023	2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ekuitas Awal	864,924,076.51	971,999,022.51	
	RK PPKAD	16,460,261,790.00	17,141,575,438.00	
	Surplus/Defisit - LO	(16,655,991,205.00)	(17,248,650,384.00)	
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-	
	Koreksi Kesalahan - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	
	Koreksi Kesalahan - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	
	Koreksi Kesalahan - Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	
	Koreksi Kesalahan - Gedung dan Bangunan	-	-	
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	669,194,661.51	864,924,076.51	-

a. Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebelum Tahun 2023

Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebelum Tahun 2023 sebesar Rp 0 merupakan akumulasi penyusutan aset tetap yang terdiri dari:

- 1) Peralatan dan mesin sebesar Rp (0)
- 2) Gedung dan bangunan sebesar Rp (0)
- 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp (0)

b. Koreksi Pengakuan Aset Tetap yang Belum Tercatat

Koreksi pengakuan tambahan aset tetap yang belum tercatat barang dan jasa sebesar Rp 0



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 tahun 2012 tentang Fungsi dari Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai kedudukan tugas dan fungsi sebagaimana di jelaskan dibawah ini.

4.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Lingkup Kabupaten Ciamis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis memiliki Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Kinerja Pelayanan DPMD diukur berdasarkan beberapa indikator kinerja Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Perdesaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024.

4.2 Tugas dan Fungsi

4.2.1 Tugas

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Bupati.

4.2.2 Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahn Desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahn Desa;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Perlengkapannya :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
 3. Fungsional umum;
- d. Bidang Pemerintahan Desa :
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 3. Fungsional Umum
- e. Bidang Pembangunan Desa :
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda
 3. Fungsional Umum.

4.4 Data SDM/ Pegawai

Data SDM/ Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	APE RUSWANDANA, SP	19710714 200312 1 003	IV/b	KEPALA DINAS
2	Hj. SUSI MAULUDAYANI, S.P, MP	19710518 199703 2 001	IV/b	SEKRETARIS
3	PURWANTORO, S.IP	197201252007011008	III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	CANDRA SETIAWAN, SH.M.M	19780823 200801 1 004	III/b	Ka.Subag Perencanaan dan Keuangan
5	USEP SAEFUL HANAN	19810725 201409 1 001	III/a	Bendahara
6	SENI LESTARI, A.Md. I.P	19960601 202012 2 005	II/c	Bendahara Gaji
7	ELIS ANDRIANI, S.IP	19910606 202321 2 068	IX	Ahli Pertama Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
8	DEWI AYU RATNAWATI, S.IP	19950404 202321 2 047	IX	Ahli Pertama Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
9	ERMA YULIAN A, S.IP, M.M	19851230 200501 2 004	III/d	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
10	BUDI SETIAMAN, SP	19801126 200901 1 002	III/d	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
11	TAJUL ARIFIN	19770708 201409 1 001	II/c	Bendahara Pengeluaran Pembantu
12	RAHMAT SLAMET	19680803 200701 1 007	III/a	Fungsional Umum
13	HAIKAL MUJAHID, S.Sos	19880227 202321 1013	IX	Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat

14	NANANG KOMARA	19690602 200901 1 003	II/d	Fungsional Umum
15	ANDI SOPYANDI, S.IP. M.Si	19780925 200312 1 006	IV/a	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
16	IWAN HERNAWAN, S.IP	19701019 199103 1 008	III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda
17	ADE KURNIAWAN, S.SOS	19720516 199311 1 001	III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda
18	DENY MUHAMAD R, A.Md	19910128 202012 1 001	II/c	Fungsional Umum
19	ERWIN M SYAM, S.IP	19771019 199803 1 003	IV/a	Kepala Bidang Pembangunan Desa
20	GANJAR YURI RAHMAN, SE	19821113 201001 1 008	III/c	Analisis Kebijakan Ahli Muda
21	IIS NIAWATI, SH. MM	19710124 201001 2 001	III/c	Analisis Kebijakan Ahli Muda
22	RIEKA RACHMATIKA W. S.IP	19800621 200312 2 005	III/d	Fungsional Umum
23	HERI	19670503 200701 1 038	III/a	Fungsional Umum
24	ADE TAOPIK	19931129 202321 1 018	IX	Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat



BAB V PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun Anggaran 2022 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) per 31 Desember 2023 sehingga diharapkan dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Seperti diketahui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis baru berdiri sejak 5 Januari 2015. Perjalanan yang baru menginjak 8 tahun ini mungkin lebih banyak kekurangan jika dibandingkan dengan SKPD lainnya. Oleh karena itu, laporan akhir tahun ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Kelemahan dan kekurangan laporan akhir tahun ini akan dijadikan bahan perbaikan untuk laporan-laporan berikutnya.

Demikian, mohon maklum dan atas perhatian semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Ciamis, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ciamis

APE RUSWANDANA
NIP. 19710714 200312 1 003

LAMPIRAN - LAMPIRAN